

INDUSTRIALISASI DAN IDENTITAS MASYARAKAT KOTA BATAM

Sugih Biantoro

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia
bian_ase@yahoo.com ; sugih.biantoro@gmail.com

Abstract

Batam city is one of the regions in Indonesia that showed a high level of industrialization progress. As cities opposite the state of Singapore, Batam expected to compete with the neighboring region. The rapid economic development of Batam city is able to create an attraction for migrants from other regions in Indonesia. Today, Batam become a melting pot, because it is formed by the people who come from backgrounds different. The development of industrialization that occurred in Batam city contributed to create the economic competition among the public. Competition raises group or class that emphasizes the similarity backgrounds, such as ethnic, religion, and others to gain access to a better life. The strategy of each group communities in maintaining their position in the economic competition in Batam city that does not created a single identity. Identity is formed into a fluid accordance with existing interests. How identity politics in society of Batam city is a problem in this study. While the purpose of this study is to know how society formed political identities in the city of Batam. This study used a qualitative approach, through interviews and participant observation. Search data is also obtained through the manuscripts and books that can be used as reference material. The results obtained in this study is that people in the city of Batam form groups or classes based backgrounds vary in relation to ease of access to life, especially economic problems. Individuals in the group or class are not steady, but it is fluid in which they can move according to their individual interests. That condition is a strategy in articulating their positioning in the midst of rapid industrialization in the city of Batam.

Keywords: Industrialization, Identity, Ethnic Groups

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu wilayah perbatasan di Indonesia, Batam merupakan salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kontribusi Batam pada pembangunan nasional cukup besar. Investasi yang telah ditanamkan pemerintah sebesar 2 triliun telah kembali sekitar 4,4 triliun dalam 5 tahun terakhir.¹ Sejak Pulau Batam dan beberapa pulau di sekitarnya dikembangkan menjadi daerah industri, perdagangan, dan pariwisata, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan.

¹ Dinamika ekspor kumulatif sampai tahun 2001 mencapai US \$ 56 miliar, Batam menyumbang devisa nasional hingga 9,6%. Lihat Sita Rohana dan Zulkifli Harto (2006). *Meniti Riak Gelombang Perubahan: Kajian Mengenai Orang Melayu di Perbatasan Kepulauan Riau*. Tanjung Pinang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, hlm. 35.

Didukung pula adanya kelesuan ekonomi akibat krisis ekonomi tahun 1997, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan di daerah lain, seperti Pulau Jawa. Batam telah mempunyai daya tarik tersendiri, khususnya bagi pendatang yang ingin mendapatkan lapangan pekerjaan. Dari hasil sensus, selama periode 1990-2000, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Batam pertahunnya sebesar 12,87%. Penduduk di Batam sebagian besar adalah para pekerja yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Sampai sekarang, arus pendatang dari berbagai daerah di Indonesia ke kota Batam hampir tidak pernah surut. Padatnya penduduk karena banyaknya pendatang dari berbagai daerah lain di Indonesia, memunculkan masalah tersendiri bagi pemerintah setempat. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah setempat mulai memperketat arus pendatang yang masuk ke kota ini. Meskipun dalam realisasinya, pemerintah menghadapi banyak kendala, karena banyaknya pendatang gelap. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dikarenakan banyaknya para pendatang dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti budaya, status sosial, dan agama, membawa dampak pada munculnya berbagai permasalahan sosial.

Salah satu contoh masalah yang ditimbulkan adalah berkembangnya rumah liar (ruli) yang dibangun di banyak lahan di kota Batam. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari mahalannya harga rumah dan tingginya biaya kost, sehingga para pendatang memutuskan untuk mencari jalan pintas dengan mendirikan ruli di lahan-lahan kosong yang sebenarnya telah melanggar aturan yang berlaku di kota tersebut. Walaupun, pemerintah daerah telah berupaya mengatasi permasalahan ruli melalui kebijakan tata ruang kota, namun tetap saja belum dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Pulau Batam yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) adalah kawasan bagi orang Melayu. Banyaknya para pendatang yang menetap di daerah ini, mengakibatkan mulai terkikisnya keberadaan orang Melayu oleh kehidupan multietnis.² Akan tetapi, bukan berarti orang Melayu sama sekali hilang dari kehidupan Batam, karena adanya keberagaman etnis yang terjadi, merupakan salah satu bukti dari sifat orang Melayu yang selalu terbuka terhadap kaum pendatang yang menetap di daerah ini. Kondisi tersebut sudah tercermin jauh sebelum Batam menjadi kota yang maju seperti sekarang ini.

Awal mula berkembangnya industri di Batam, ditandai oleh munculnya satuan-satuan pemukiman sebagai tempat konsentrasi para pendatang yang terdiri dari berbagai sukubangsa di Indonesia. Pada masa itu, kemudian muncul apa yang dinamakan dengan kampung Jawa, Minang, Melayu, dan sebagainya. Kondisi itu, diperkirakan sebagai konsekuensi dari corak pertumbuhan industri yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata dan kurang memperhatikan penataan kehidupan masyarakat setempat.³ Dalam kaitannya dengan ini, maka kesukubangsaan yang direpresentasikan dalam bentuk "segregasi kampung", muncul sebagai kekuatan sosial

² Tulisan yang cukup lengkap tentang keberadaan penduduk asli Melayu dapat dilihat dalam buku karangan Syamsul Bahrum (2008) yang berjudul *Indigenous People in a Dependent Economy: A Case Study of the Socioeconomic Impacts of Regional Development on the Indigenous People in the Islands of Batam, Province of Riau-Indonesia*. Batam: Batam Link Publisher.

³ Yulizar Syafri. (2010). *Kontekstualisasi Kesukubangsaan di Perkotaan*. Institut Antropologi Indonesia, hlm. 45.

bagi masyarakat pendatang dalam memperjuangkan kepentingannya, terutama yang berkaitan dengan penguasaan sumberdaya strategis untuk bertahan hidup di Batam.

Tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dalam "payung" industrialisasi di Batam telah menghilangkan beberapa satuan-satuan pemukiman sukubangsa. Walaupun demikian, kekuatan sosial kesukubangsaan dalam pengorganisasian diri anggotanya tidak menghilang sama sekali, melainkan menjadi acuan bagi para pendatang tersebut untuk membentuk "wadah" melalui perkumpulan-perkumpulan orang sesukubangsa. Menurut Manuel Castles:

"Identities are sources of meaning for the actors themselves, and by themselves, constructed through a process of individuation. Identities can also be originated from dominant institutions, they become identities only when and if social actors internalize them, and construct their meaning around this internalization".⁴

Sukubangsa memang acapkali menjadi bagian dari suatu identitas baik bagi penduduk asli maupun para pendatang. Identitas sukubangsa ini muncul bila masing-masing individu yang berbeda kategori sukubangsanya saling melakukan interaksi sosial. Walaupun demikian, identitas tidaklah bersifat statis dan kaku, namun bersifat cair, dan merupakan sebuah konstruksi yang bukan *given*. Dalam menghadapi permasalahan sosial, individu yang merupakan bagian masyarakat Batam tidak mesti menggunakan identitas sukubangsa, kadang mereka lebih mengedepankan profesi dalam pekerjaan, kesamaan keyakinan beragama, atau dalam bentuk yang lain. Kondisi tersebut, merupakan strategi lain dalam mengartikulasikan *positioning* mereka ditengah persaingan ekonomi di Kota Batam.

B. Metodologi

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Suatu jenis penelitian yang lebih mengutamakan data-data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi disamping data-data sekunder yang mendukung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan demografi politik, yaitu sebuah pendekatan yang menempatkan sebuah permasalahan sosial atau kebudayaan sebagai sebuah konsekuensi atau implikasi dari adanya interaksi atau hubungan timbal balik antara pertumbuhan demografis di satu sisi, dan perubahan politik di sisi lain. Memandang identitas masyarakat kota Batam dari perspektif demografi politik berarti mencoba menerangkan isu identitas yang muncul di wilayah tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi dan implikasi terjadinya interaksi faktor demografis dan politik di wilayah Batam.

C. Perkembangan Industrialisasi dan Perubahan Sosial di Kota Batam

Sejak tahun 1975, Batam telah berkembang menjadi kota industri.⁵ Pembangunan daerah Batam yang sudah dirintis 37 tahun yang lalu, tidak lepas dari keinginan pemerintah pusat yang melihat potensi daerah ini sebagai wilayah perbatasan yang strategis, karena berada pada jalur perlintasan dunia. Sehingga memiliki potensi

⁴ Manuel Castells. (1997). *The Power of Identity*. Massachusetts, USA: Blackwell Publishers, hlm. 7.

⁵ Kegiatan industri adalah penciptaan nilai tambah melalui suatu proses pengolahan. Industrialisasi adalah perluasan kegiatan pengolahan yang sekaligus disertai peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Lihat, Iwan. J Azis, dkk. (2010). *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 86.

ekonomi yang sangat besar jika dikelola secara khusus. Apalagi Batam ingin dijadikan seperti Singapura, yang sudah maju mendahului.

Sebelum mulai dikembangkannya Batam sebagai pusat industri, daerah ini hanyalah pulau yang sepi. Jumlah penduduk masih kecil, yang sebagian besar menetap di kawasan pesisir pantai. Pembangunan Pulau Batam secara khusus tersirat dalam keputusan Presiden No. 74 tahun 1971 tentang pembangunan Pulau Batam. Dalam Keppres tersebut, secara jelas menyebutkan bahwa Pulau Batam ditetapkan sebagai daerah industri dan dikelola secara khusus dengan membentuk suatu badan. Badan yang dimaksud adalah Otorita Batam yang ditegaskan dalam Keppres No. 41 tahun 1973.

Tugas dari Otorita Batam adalah: *Pertama*, mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam. *Kedua*, mengembangkan dan mengendalikan kegiatan pengalihkapalan di Batam. *Ketiga*, menjamin agar tata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Batam.

Dampak dikeluarkannya kebijakan pemerintah tersebut, Batam berhasil tumbuh dan berkembang sebagai salah satu daerah industri yang maju. Terbukanya lapangan kerja menjadi daya tarik para pendatang yang berharap memperoleh pekerjaan yang lebih baik di daerah ini. Akibatnya, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun tumbuh secara signifikan. Penduduk Kota Batam berdasarkan hasil sensus penduduk 2000 berjumlah 434.286 jiwa, sedangkan hasil registrasi penduduk tahun 2001 penduduk Kota Batam telah mencapai 527.151 jiwa, tahun 2002 sebesar 533.521 jiwa dan tahun 2003 telah mencapai 562.661 jiwa.⁶ Data terakhir, penduduk kota Batam pada Maret 2011 adalah 1.081.527 orang terdiri dari 558.461 laki-laki dan perempuan 523.066.⁷ Hanya saja penyebarannya tidak merata, sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk di daerah ini bervariasi.

Pada tahun 1999, pemerintah pusat membentuk struktur pemerintahan kota (pemkot) Batam, seiring diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Pada satu sisi, kebijakan tersebut dinilai baik guna pembangunan daerah dan birokrasi pelayanan masyarakat. Namun di sisi yang lain, kebijakan tersebut dapat memunculkan permasalahan terutama berkenaan dengan kewenangan khusus dalam pengelolaan Batam, karena sebelumnya daerah industri ini berada di bawah pengelolaan Badan Otorita Batam.⁸

Pemukiman-pemukiman yang dijadikan sebagai tempat konsentrasi para pendatang merupakan konsekuensi dari majunya industri di Batam. Pada masa itu, di Batam muncul kampung-kampung yang diberi nama sesuai dengan asal daerah para pendatang, seperti kampung Jawa, Melayu, Bugis, Minang, Cina, Batak, dan

⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷ <http://skpd.batamkota.go.id>, 2011.

⁸ Op.cit., Siti Rohana dan Zulkifli Harto. (2006), hlm. 35. Oleh sebab itu, sering terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan dan isu dualisme kepemimpinan karena masing-masing lembaga merasa lebih berwenang dari yang lain. Hal tersebut tentunya dapat merugikan iklim pembangunan. Pembuatan UU yang lebih tegas untuk mengatur kewenangan lembaga di daerah industri ini nampaknya perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah.

sebagainya.⁹ Sedangkan, orang Melayu sebagai penduduk asli atau disebut sebagai orang *tempatan*, tentu sudah menempati daerah ini lebih dahulu daripada etnis yang lain. Dalam perkembangannya, orang Melayu banyak yang berpindah ke daerah-daerah *hinterland* kota Batam karena kalah bersaing dengan para pendatang.

Sejalan dengan majunya industrialisasi, tumbuh pusat-pusat perdagangan di Batam. Dikarenakan pusat-pusat perdagangan ini membutuhkan lahan yang luas, hal ini berdampak pada keberadaan lokasi pemukiman para pendatang yang telah ada sebelumnya. Seiring dengan pembangunan pusat-pusat perdagangan, keberadaan wilayah-wilayah pemukiman semakin hilang, karena lahan mereka yang digunakan untuk pembangunan pusat-pusat tersebut. Akan tetapi, tidak lantas nilai-nilai kesukubangsaan yang diwadahi dalam sebuah "kampung" turut hilang bersama wilayahnya. Kondisi tersebut, malah memunculkan bentuk perkumpulan-perkumpulan orang sesukubangsa atau yang dikenal dengan nama "paguyuban" sukubangsa sebagai sebuah pengorganisasian diri yang baru.

Dengan kata lain, pengorganisasian diri berdasarkan kesukubangsaan terus bertahan sampai saat ini. Contohnya di bidang politik, dari awal berkembangnya Batam sekitar tahun 1970 hingga berdirinya Pemerintah Kota Batam sekitar tahun 1999, di daerah ini belum memiliki institusi formal yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Kondisi demikian, menyebabkan kekuatan politik masyarakat Batam terakumulasi melalui perkumpulan-perkumpulan sesukubangsa tersebut. Hingga saat ini, walaupun institusi formal di bidang politik sudah terbentuk di Batam, namun bentuk perkumpulan-perkumpulan sesukubangsa masih tetap bertahan.

Tumbuhnya perkumpulan sesukubangsa di Batam menjadi fenomena yang terlihat pada seluruh sukubangsa yang ada di kota tersebut, baik yang tergolong sebagai pendatang maupun sukubangsa asli. Apabila orang Minangkabau memiliki IKSB (Ikatan Keluarga Sumatera Barat), maka orang Jawa memiliki Jogoboyo (Perkumpulan Orang Jawa). Ada pula IKABSU (Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara), PERKIT (Persatuan Keluarga Indonesia Timur), dan PSMTI (Persatuan Marga Tionghoa seluruh Indonesia). Sedangkan orang Melayu sebagai penduduk asli memiliki KKBM (Kekerabatan dan Keluarga Besar Melayu). Perkumpulan-perkumpulan tersebut adalah perkumpulan sesukubangsa yang besar di Batam.

Batam yang telah berkembang pesat menjadi daerah industri juga turut menciptakan permasalahan sosial dan munculnya kejahatan masyarakat, seperti tindak kekerasan, pencurian, dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk yang sangat drastis walau telah diantisipasi melalui perda pendudukan yang dilakukan oleh Pemko Batam, seakan tak mampu menahan laju pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung hingga saat ini, sehingga dampak dari permasalahan itu salah satunya adalah tumbuhnya ruli (rumah liar).

⁹ Keadaan tersebut, merupakan konsekuensi dari ciri pertumbuhan industri yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan penataan kehidupan masyarakat setempat. Dalam kaitannya dengan ini maka kesukubangsaan muncul sebagai kekuatan yang menata kehidupan masing-masing sukubangsa dalam memperjuangkan kepentingannya, terutama yang berkaitan dengan penguasaan sumberdaya strategis untuk bertahan hidup di Batam, seperti lahan yang digunakan sebagai tempat tinggal di Batam. Lihat Yulizar Syafri. (2010), hlm. 45.

Pada tahun 2000, jumlah ruli di Batam diperkirakan telah sama banyak dengan jumlah pemukiman resmi. Tidak hanya itu, diperkirakan para pendatang yang tergolong baru telah membangun sebelas ruli setiap harinya. Ruli muncul di antara bangunan pusat-pusat kegiatan industri dan perdagangan. Komplek pemukiman ini banyak dihuni oleh buruh-buruh pabrik dan bangunan, serta para pekerja sektor informal. Tanah-tanah kosong yang mereka tempati merupakan tanah milik pemerintah daerah atau pemilik modal yang belum digarap. Pada mulanya, sebagian besar penghuni ruli adalah para pekerja dengan tingkat ekonomi rendah, namun lama-kelamaan banyak pekerja menengah yang memilih tinggal di ruli.¹⁰

Perkembangan industri di Batam juga membawa dampak bagi penduduk asli yang bekerja sebagai nelayan di pinggiran kota Batam. Pengerukan-pengerukan pesisir laut oleh perusahaan-perusahaan membuat ikan makin berkurang. Sedangkan, mereka sulit untuk beralih pekerjaan karena tingkat pendidikan mereka yang rendah. Akhirnya mereka hanya sebagai penonton di tengah-tengah perkembangan ekonomi di kota Batam. Pendapatan pencaharian sebagian nelayan menjadi berkurang setelah adanya pengeboran dan pembangunan di wilayah pesisir. Dampak yang dihasilkan dari pembanguna tersebut adalah pencemaran yang menyebabkan berkurangnya jumlah jenis ikan tertentu seperti sotong atau cumi yang menjadi tangkapan utama para nelayan. Pembangunan terjadi setelah tahun 1992.¹¹

D. Konstruksi Identitas

Stuart Hall menempatkan identitas menurut tiga konsep, yaitu *enlightenment subject*, *sociological subject*, dan *postmodern subject*.¹² Identitas dilihat sebagai *enlightenment subject*, pada hakekatnya manusia merupakan subjek yang terpusat, individu yang menyatu, subyek secara fitrahnya mewarisi apa yang dikatakan sebagai beragam alasan (*reason*), kesadaran (*consciousness*), dan aksi (*action*). Pusat dari segala hal yang esensial menyangkut diri inilah yang disebut sebagai 'identitas' seseorang.

The Sociological Subject merupakan subyek (individu) yang dihasilkan dari relasi yang terjadi di wilayah sosial atau yang disebut Hall sebagai *significant others*. Identitas, dalam konsep ini, pada dasarnya menghubungkan apa yang disebut 'yang di dalam' sebagai wilayah pribadi dan 'yang di luar' sebagai wilayah sosial. Subyek, yang sebelumnya memiliki identitas yang stabil dan menyatu selanjutnya akan terfragmentasi tidak hanya menjadi satu melainkan beberapa identitas; yang terkadang hal demikian menimbulkan kontradiksi atau identitas yang *unresolved identities*.

Identitas pada akhirnya, yang tersusun dari aspek *the social landscapes out there* dan yang memberikan rasa kenyamanan secara subyektif melalui kebutuhan yang objektif yang berasal dari kultur, akan terpecah-pecah sebagai hasil dari perubahan struktur dan institusional. *The postmodern subject* bahwa identitas itu merupakan pengertian yang harus didekati melalui historis. Subyek diasumsikan memiliki identitas yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Bagi Hall, identitas yang dimiliki oleh diri

¹⁰ Rohana, Siti dan Suarman. (2006). *Kepulauan Riau: Metropolitan Baru di Perbatasan*. Tanjung Pinang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, hlm. 52.

¹¹ Wawancara dengan Pak Daus (46 tahun), warga Batam yang berasal dari etnis Melayu yang bermata pencaharian sebagai nelayan, tinggal di Pulau Akar (Pulau di sekitar Pulau Batam). Wawancara dilakukan pada tanggal 14 April 2011.

¹² Stuart Hall. (1992). "The Question of Cultural Identities" in S. Hall, D. Held and T. McGrew (ed). *Modernity and Its Future*. Cambridge: Polity Press, hlm. 275-277.

dan dibawa sejak dilahirkan sampai mati sebenarnya adalah konstruksi diri kita sendiri. Produksi dari subyek postmodern ini secara konseptual tidaklah pasti dan sudah jadi, esensial atau identitas yang telah permanen.

Dewasa ini kata "identitas" telah menjadi sebuah slogan populer yang pengertiannya terlalu disederhanakan dan dimengerti sebagai esensi pribadi atau jati diri¹³. Akan tetapi, pemaknaan "identitas" tidak mungkin terungkap dalam suatu definisi yang tegas dan sederhana, karena merujuk pada keseluruhan kompleks dan multidimensi di mana individu dan masyarakat saling berkait. Itulah alasannya mengapa Erikson menyebut "identitas" sebagai "psikososial", sebab di sini kita menghadapi satu proses yang berakar dan berlangsung di dalam lapisan inti jiwa perorangan, tetapi sekaligus menyangkut pula inti pusat kebudayaan masyarakatnya.

Sebagai yang subyektif dan sekaligus kolektif, masyarakat Kota Batam dalam identitas ke-diriannya, ke-sukubangsanya, dan ke-indonesiaan hadir secara bersamaan. Identitas memiliki kandungan politis di dalamnya. Pengertian politis ini baik dari proses pembentukan identitas yang dipengaruhi oleh hal-hal yang politis, maupun penggunaannya dalam relasi-relasi yang bersifat politis. Masyarakat di Kota Batam, membentuk identitasnya demi hal-hal yang politis, yaitu demi kepentingan mereka terutama kepentingan ekonomi, dimana kepentingan itu bersifat dinamis dan temporal.

Dalam kompetisi perebutan maupun penguasaan sumberdaya yang berlangsung di antara anggota masyarakat, membuat individu-individu mengintegrasikan dirinya ke dalam kelompok yang dalam hal ini adalah perkumpulan sesukubangsa. Menurut Erikson (2002), Identitas adalah konfigurasi integratif dari masa lampau dengan masa sekarang dan dari yang di dalam dan yang di luar, ke dalam suatu keseluruhan baru. Secara ilmiah, identitas merupakan satu proses, sebuah sintesis ego yang sebagian besar berlangsung secara tidak sadar dan yang mengintegrasikan berbagai macam diri atau aspek diri si individu ke dalam bentuk kesatuan baru. Secara kodrati proses identitas ini bersifat psikososial, yang berarti pribadi membentuk identitasnya seturut cita-cita serta identitas bersama kelompoknya.

Perkumpulan sesukubangsa merupakan instrumen penting dalam upaya memenangkan sumber daya. Untuk memenangkan persaingan dalam perebutan sumberdaya tersebut perkumpulan-perkumpulan sesukubangsa dapat tumbuh menjadi kelompok-kelompok kepentingan.¹⁴ Keanggotaan seseorang pada sukubangsa tertentu tidak mendasari terbentuknya sebuah kelompok, namun sebatas memfasilitasi formasi kelompok terutama dalam arena politik. Dengan kata lain, sukubangsa merupakan komuniti politik, sesederhana apapun bentuknya, yang tumbuh karena kesadaran adanya identitas sukubangsa atau kesukubangsaan yang sama dari masing-masing anggotanya.

Dalam konteks politik dan ekonomi di Kota Batam, masing-masing sukubangsa melalui perkumpulan sesukubangsanya mengambil posisi atau peran yang berbeda-beda. Berdasarkan posisi sosial ini, terjadi perbedaan kekuatan sosial yang ada pada masing-masing sukubangsa. Perbedaan kekuatan tersebut merupakan konteks bagi berlangsungnya kompetisi dalam memperebutkan sumberdaya dan posisi strategis. Sekitar tahun 2006, di Batam terjadi peristiwa politik yang menunjukkan bahwa fungsi

¹³ Lihat Erik H. Erikson. (2002). *Identitas Diri, Kebudayaan dan Sejarah Pemahaman dan Tanggung Jawab*. Maumere: LPBAJ.

¹⁴ Lihat T.H. Eriksen. (1993). *Ethnicity and Nationalism, Anthropological Perspective*. Pluto Press.

politik yang ditonjolkan oleh perkumpulan sesukubangsa terlibat dalam persaingan memperebutkan kekuasaan politik. Upaya merebut posisi walikota Batam, orang Melayu dengan menggunakan kekuatan sosial yang terbangun dalam KKBM berhasil mendudukkan tokoh Melayu di posisi tersebut. Kenyataan ini, mendatangkan "tantangan" bagi sukubangsa pendatang, sehingga mereka beramai-ramai mengaktifkan perkumpulan sesukubangsa masing-masing sebagai kelompok tandingan.

Apa yang diperjuangkan KKBM merupakan bagian dari cara warga Melayu untuk mendominasi posisi politik mereka. Strategi ini dijadikan insiprasi bagi para pendatang untuk mengartikulasikan posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat Kota Batam.¹⁵ Bagaimanapun, para pendatang ini juga berhak untuk terlibat dalam kompetisi politik. Persaingan yang berlangsung menunjukkan bahwa masing-masing sukubangsa mengambil posisi tertentu dalam sistem politik kota Batam.

Dengan adanya perkumpulan orang sesukubangsa sebagai wadah pengorganisasian diri, maka batas-batas sosial antar sukubangsa itu dapat dan cenderung dipertahankan. Namun dalam konteks tertentu, batas-batas sukubangsa itu dapat dipertajam dan sebaliknya bisa pula dilonggarkan. Satu kasus di Batam, pernah muncul penolakan terhadap kebijakan pemberlakuan pengkaplingan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang diusulkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Kebijakan tersebut dinilai dapat menyengsarakan rakyat dan menyuburkan korupsi. Dalam menghadapi situasi seperti itu, masing-masing sukubangsa bergabung guna membangun sebuah kekuatan bersama menentang kebijakan tersebut.¹⁶

Wilayah perkotaan yang memiliki kebudayaan dominan, persaingan antara sukubangsa tidak terlihat tajam.¹⁷ Bahkan muncul kecenderungan dimana ekspresi kesukubangsaan para pendatang tidak ditampilkan. Dampaknya batas-batas sosial sukubangsa cenderung dilemahkan. Batam dianggap sebagai kota yang tidak memiliki kebudayaan dominan. Sehingga menciptakan kompetisi yang luas diantara masing-masing individu atau kelompok dalam memperebutkan kekuasaan di bidang ekonomi dan politik.

Akan tetapi, bukan berarti akibat dari penciptaan batas-batas sukubangsa kemudian lantas menjadi jaminan bahwa masing-masing anggota selalu menggunakan atribut yang sama. Kenyataannya muncul berbagai pilihan atribut, dikarenakan salah satunya adalah perbedaan kekuatan sosial di antara masing-masing anggota. Selain itu, konteks tertentu yang diterjemahkan sebagai hubungan antara kekuatan menyebabkan tidak adanya keseragaman dalam pemilihan atribut-atribut penanda bagi kesukubangsaan. Hal ini dapat terjadi karena hubungan antar kekuatan yang tercermin dalam interaksi antara sukubangsa mendasari terjadinya seleksi atribut di tingkat individual. Mengingat masing-masing individu ini tidak memiliki posisi sosial yang sama dalam struktur sosial setempat, atau tersebar dalam berbagai posisi sosial yang ada.¹⁸

Ratusan sopir taksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Bareleng (FKPTPB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor

¹⁵ Mengenai Artikulasi dan Posisioning dapat dilihat dalam artikel Tania Murray Li. (1997). *Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and tribal Slot*.

¹⁶ *Op.cit.*, Yulizar Syafri, hlm. 57.

¹⁷ Lihat Edward M. Bruner. (1974). "Expression of Ethnicity in Indonesia" dalam *Urban Ethnicity*, Abner Cohen (ed). London: Tavistock.

¹⁸ *Op.cit.*, Yulizar Syafri, hlm. 22.

Pemerintahan Kota Batam pada tanggal 14 Juni 2011. Demonstrasi tersebut dilakukan untuk mendesak Pemko Batam mencabut izin taksi Silver Cab yang dinilai telah merugikan ribuan taksi yang ada di Kota Batam. Mereka yang melakukan unjuk rasa telah melepaskan atribut kelompok sesukubangsanya, namun lebih mengedepankan perkumpulan yang lain yang dilandasi atas kesamaan profesi. FKPTPB adalah identitas lain yang digunakan oleh para sopir, walaupun mayoritas mereka berasal dari Minangkabau.¹⁹

Contoh lain adalah peristiwa demonstrasi ribuan buruh pada tanggal 24 November 2011. Ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Wali Kota Batam. Mereka menuntut agar upah minimum kota Batam tahun 2012 sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan meminta melakukan negosiasi dengan Wali Kota secara langsung. Para Buruh merasa tidak puas dengan kenaikan gaji yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam yaitu dengan kenaikan UMR menjadi 1,2 juta rupiah. Para Buruh melalui serikat pekerja mereka menuntut kenaikan UMR menjadi 1,7 juta rupiah, karena para buruh beranggapan bahwa harga itulah yang cukup layak untuk hidup di Batam.

Saat melakukan demonstrasi, mereka tidak mengatasnamakan perkumpulan sesukubangsa tapi lebih mengedepankan posisi sosial mereka yang berprofesi sebagai buruh. Para buruh yang berdemo ini mencoba untuk mengartikulasikan posisi mereka dengan melawan pemerintah kota. Mengapa mereka tidak mengatasnamakan perkumpulan sesukubangsa? Apabila memang mereka menggunakan atribut suku-bangsa, kepentingan yang diperjuangkan tidak akan terkoordinasi dengan baik, karena adanya perbedaan latar belakang suku-bangsa di dalam profesi buruh di kota Batam. Lain halnya apabila konteks yang terjadi adalah ketika mereka menyuarakan bahwa taraf hidup di kota Batam cukup tinggi, maka perlu disesuaikan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia atau Singapura. Di sini mereka sudah menggunakan atribut identitas yang lain, dimana mereka memposisikan diri sebagai masyarakat Batam yang terletak di wilayah perbatasan yang perlu belum mendapatkan kesejahteraan secara baik dari pemerintah pusat. Dalam arti lain, mereka memposisikan diri bukan sebagai masyarakat di kota Batam yang memiliki kemajuan industri lebih tinggi daripada wilayah lain di Indonesia.

Di Batam, tidak jarang terjadi konflik antara individu maupun individu dengan kelompok yang pada akhirnya membawa keterlibatan perkumpulan sesukubangsa. Contohnya, konflik yang terjadi antara orang Batak Toba dengan perkumpulan Melayu. Konflik tersebut muncul akibat pernyataan seorang oknum pejabat yang terkenal di Batam bahwa tidak ada penduduk asli di Batam. Batam sebelumnya adalah daerah kosong yang dihuni oleh kera. Pernyataan oknum tersebut membuat orang Melayu merasa tersinggung. Melalui perkumpulan Melayu, mereka menuntut agar si oknum membuat pernyataan maaf selama beberapa hari di media massa atau keluar dari Batam.²⁰

¹⁹ Terjadinya karakteristik profesi di Batam hampir sama dengan apa yang terjadi di daerah lain, dimana masing-masing suku-bangsa memiliki "wilayah" nya sendiri-sendiri dalam lapangan pekerjaan. Berdasarkan penelitian pribadi yang dilakukan di kota Batam, menunjukkan bahwa mayoritas sopir angkutan di kota tersebut berasal dari Minangkabau dan beberapa berasal dari Medan. Untuk Pekerja di pemerintahan, Jawa dan Melayu lebih dominan daripada suku yang lain. Sedangkan profesi pedagang didominasi oleh mereka yang berasal dari Minangkabau dan etnis Cina.

²⁰ *Op.cit.*, Yulizar Syafri, hlm. 99.

Terdapat kecenderungan bahwa konflik-konflik identitas selalu dipicu oleh gagasan 'fatalistik' yang mereduksi 'identitas' menjadi sekedar sebuah 'pertalian tunggal'. Dalam komunitas homogen yang samapun tetap berpeluang terjadinya keretakan identitas. Identitas tidak akan berdiri mapan dan tetap. Ada ruang dan waktu yang amat mempengaruhi. Ia juga ditentukan oleh kondisi-kondisi material yang melingkupinya. Bagaimana ia melemah dan bagaimana ia bisa menguat tidak bisa dilihat secara mekanis. Kadang letupannya hadir tidak terduga dan tidak terbayangkan sebelumnya.²¹

E. Kesimpulan

Kemajuan industri di Batam telah membawa perubahan sosial yang signifikan di kota tersebut. Salah satunya adalah muncul persaingan untuk menguasai sumber daya strategis terutama ekonomi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, masyarakat di Batam membentuk kelompok atau golongan yang berbeda-beda dalam kaitannya dengan kemudahan akses sumber daya tersebut. Salah satu kelompok yang dimaksud adalah perkumpulan sukubangsa yang menjadi identitas bagi para pendatang yang berasal dari berbagai daerah lain di Indonesia.

Anggota dalam perkumpulan sukubangsa memanfaatkan kekuatan sosial yang terbentuk untuk kepentingannya termasuk kepentingan sukubangsanya. Akan tetapi, anggota tersebut tidaklah tetap di dalam perkumpulannya. Mereka sangatlah cair dimana dapat "berpindah-pindah" sesuai dengan kepentingannya. Kondisi tersebut merupakan strategi dalam mengartikulasikan positioning mereka di tengah-tengah pesatnya industrialisasi di kota Batam.

Referensi

Wawancara

Wawancara Daus (46 tahun), Etnis Melayu, pada tanggal 14 April 2011.

Buku dan Artikel

Azis, Iwan. J, dkk. (2010). *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Bahrum, Syamsul. (2008). *Indigenous People in a Dependent Economy: A Case Study of the Socioeconomic Impacts of Regional Development on the Indigenous People in the Islands of Batam, Province of Riau-Indonesia*. Batam: Batam Link Publisher.

Castells, Manuel. (1997). *The Power of Identity*. Massachusetts, USA: Blackwell Publishers.

Erikson, Erik H. (2002). *Identitas Diri, Kebudayaan dan Sejarah Pemahaman dan Tanggung Jawab*. Maumere: LPBAJ.

²¹ Lihat, Amin Maalouf. (2004). *In the Name of Identity (terj)*. Yogyakarta: Resistbook, hlm. 31.

- Eriksen, T.H. (1993). *Ethnicity and Nationalism, Anthropological Perspective*. Pluto Press.
- Gafnesia, Dahsyat, dkk. (2007). *Pelabuhan Riau: Hubungan dan Peranannya dengan Daerah-daerah Hinterland Tahun 1700—1973*. Tanjung Pinang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Gunawan, Markus. (2008). *Provinsi Kepulauan Riau*. Batam: Titik Cahaya Elka.
- Hall, Stuart. (2006). "Cultural Identity and Diaspora". In *Theorizing Diaspora*, edited by Jana Evans Braziel and Anita Mannur, 233-246. Malden, MA: Blackwell.
- , (1992). "The Question of Cultural Identities" in S. Hall, D. Held and T. McGrew (ed). *Modernity and Its Future*. Cambridge: Polity Press.
- Hood, Hoesniar. (2008). *Mahmud Jadi Dua: Kumpulan Kolom Temberang batam Pos*. Tanjung Pinang: Yayasan Sanggam.
- Maalouf, Amin. (2004). *In the Name of Identity (terj)*. Yogyakarta: Resistbook.
- M. Bruner, Edward. (1974). "Expression of Ethnicity in Indonesia" dalam *Urban Ethnicity*, Abner Cohen (ed). London: Tavistock.
- Murray Li, Tania. (1997). *Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and tribal Slot*.
- Rohana, Sita dan Suarman. (2006). *Kepulauan Riau: Metropolitan Baru di Perbatasan*. Tanjung Pinang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Rohana, Sita dan Zulkifli Harto. (2006). *Meniti Riak Gelombang Perubahan: Kajian Mengenai Orang Melayu di Perbatasan Kepulauan Riau*. Tanjung Pinang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Syafri, Yulizar. (2010). *Kontekstualisasi Kesukubangsaan di Perkotaan*. Institut Antropologi Indonesia.
- Triana Wulandari dkk. (2009). *Sejarah Wilayah Perbatasan Batam-Singapura 1824—2009, Satu Selat Dua Nakhoda*. Depok: Gramata Publishing.

Internet

<<http://skpd.batamkota.go.id>>, 2011.